

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan	
Lembar Pengesahan	
Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	19
A. Tentang Kewenangan.....	19
B. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.....	24
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	24
2. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.....	25
3. Konsep Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	29
C. Mahkamah Konstitusi.....	37
D. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.....	40
1. Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi.....	40
2. Fungsi Pemilihan Umum.....	44
3. Peserta Pemilihan Umum.....	45
4. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.....	49
5. Pemilihan Kepala Daerah.....	57
BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	60

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada.....	60
B. Eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	65
BAB IV EKSISTENSI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG UNDANG.....	70
A. Eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	70
B. Permasalahan Hukum Yang Terjadi Berkaitan Dengan Adanya Pengaturan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Serta Bagaimana Seharusnya Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Menangani Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84